

POLICY NOTE SERIES

Policy Note CELIOS Edisi Mei 2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nilai Tukar Rupiah, dan Dinamika Harga Pangan:

Apakah Ekspansi SPPG Berkaitan dengan Tekanan Harga Lokal?

Isnawati Hidayah

Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Media Wahyudi Askar

Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

30 Mei 2026

Catatan kebijakan ini disusun oleh tim peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sebagai respons terhadap perkembangan terkini terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinamika nilai tukar rupiah, dan stabilitas harga pangan di Indonesia.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Jl. Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat

Email: admin@celios.co.id

Website: www.celios.co.id

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nilai Tukar Rupiah, dan
Dinamika Harga Pangan: Apakah Ekspansi SPPG Berkaitan dengan
Tekanan Harga Lokal? *

Isnawati Hidayah, Media Wahyudi Askar

Temuan Utama:

- Setiap tambahan 10 SPPG berkorelasi dengan kenaikan harga pangan rata-rata untuk komoditas umum, sekitar 0,08 persen di tingkat kabupaten/kota.
- Setiap tambahan 10 unit SPPG di kabupaten/kota berkorelasi dengan kenaikan harga komoditas yang umum digunakan oleh SPPG dalam MBG sekitar 0,12–0,13%, terutama beras, telur, ayam, ikan, minyak goreng, gula, bawang, dan cabai.
- Pelemahan rupiah cenderung diikuti kenaikan harga pangan pada tingkat agregat, tetapi hubungan tersebut melemah setelah faktor-faktor seperti musim panen, inflasi, distribusi pangan, dan kondisi pasar nasional diperhitungkan (time fixed-effect).
- Masyarakat desa juga merasakan akibat tidak langsung dari pelemahan nilai tukar Rupiah melalui biaya produksi, bahan baku impor, pupuk, pakan ternak, dan rantai pasok pangan.
- Ketika nilai tukar menjadi lebih tidak stabil, harga komoditas impor yang dikonsumsi dalam negeri cenderung menghadapi tekanan kenaikan pada periode waktu berikutnya.

*Isnawati Hidayah dan Media Wahyudi Askar adalah peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Diskursus terkait studi silahkan menghubungi isnawati.hidayah@celios.co.id

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran. Namun, ekspansi program melalui peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi meningkatkan permintaan pangan lokal dan memengaruhi harga pangan. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat mendorong kenaikan harga pangan melalui peningkatan biaya impor pangan dan input produksi pertanian. Studi ini menganalisis hubungan antara ekspansi SPPG, nilai tukar rupiah, dan harga pangan menggunakan data panel bulanan 418 kabupaten/kota dan 27 komoditas pangan selama Februari 2025–April 2026. Data diperoleh dari Badan Gizi Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, dan Bank Indonesia. Analisis menggunakan model panel *fixed effects panel* dengan logaritma harga pangan sebagai variabel dependen dan jumlah SPPG sebagai variabel utama. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai implikasi MBG terhadap stabilitas harga pangan lokal serta menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pangan, gizi, dan pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi.

JEL Classification: C23, E31, I18, Q11, Q18.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Harga Pangan; Inflasi Pangan; Nilai Tukar Rupiah; Kebijakan Pangan; Data Panel; Indonesia.

1 Dinamika Harga Pangan, Melemahnya Nilai Tukar Rupiah dan MBG

Pemerintah Indonesia secara simultan memperluas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada saat yang sama, harga bahan pokok seperti ayam, telur, beras minyak goreng dan kebutuhan lainnya terus merangkak naik selama beberapa waktu terakhir ¹. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah ekspansi MBG ikut mendorong kenaikan harga pangan yang akhirnya harus dibayar rumah tangga sehari-hari. Pertanyaan ini penting sebab intervensi program MBG dilakukan secara masif, membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berpengaruh signifikan pada pasar pangan domestik. Masalahnya, pelaksanaan MBG tidak disertai dengan penguatan rantai pasok lokal, dan minim pelibatan UMKM lokal. Hal ini diperparah dengan rapuhnya struktur pangan nasional berupa tingginya ketergantungan terhadap impor, distribusi yang mahal, masalah cuaca hingga gejolak ekonomi global.

Kondisi ini terjadi bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp17.845 (per 29 Mei 2026) ². Ada banyak hipotesis terkait penyebab pelemahan rupiah ini. Mulai dari gejolak ekonomi global, menurunnya kepercayaan investor asing, hingga kekhawatiran menurunnya cadangan devisa dan kebijakan fiskal yang centang perenang. Kondisi ini juga ditengarai makin memburuk akibat lemahnya kualitas komunikasi Presiden yang berkaitan dengan pasar, seperti menyatakan bahwa “orang desa tidak memakai dollar”. Efek dari pelemahan nilai tukar ini memiliki efek domino yang tidak bisa diabaikan pada kehidupan masyarakat desa. Dampaknya tidak hanya terbatas pada komoditas impor, tetapi juga pangan lokal, berupa meningkatnya biaya produksi pangan domestik yang kemudian harus ditanggung oleh masyarakat desa (mekanisme *pass-through* ke harga barang yang dikonsumsi sehari-hari).

Berdasarkan konteks tersebut, masih minim studi mampu menjelaskan persoalan ini secara empiris. Studi ini ingin menjawab dua persoalan utama. Pertama, apakah ada korelasi antara ekspansi jumlah SPPG dengan kenaikan harga pangan lokal. Kedua, sejauh mana pelemahan rupiah berkorelasi terhadap kenaikan harga pangan, khususnya masyarakat di pedesaan. Pertanyaan ini penting untuk membuktikan bahwa apapun pilihan kebijakan pemerintah, berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat bawah.

¹Bank Indonesia, *Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS)*, diakses 29 Mei 2026.

²Bank Indonesia. (2026). *Kurs transaksi BI*. Bank Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>

2 Data dan Metodologi

2.1 Data

Studi ini menggunakan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan dan Bank Indonesia dari periode 2025 dan 2026. Analisis menggunakan harga bahan pangan panel kabupaten/kota per bulan untuk periode Februari 2025 hingga April 2026. Data yang digunakan dalam analisis dimulai dari Februari 2025, karena program MBG diimplementasikan di Indonesia sejak Januari 2025. Sampel mencakup 418 kabupaten/kota dan 27 komoditas pangan dengan total 128.693 observasi harga yang valid. Variabel dependen utama adalah logaritma harga pangan rata-rata bulanan, sedangkan variabel utama yang diamati adalah jumlah SPPG pada tingkat kabupaten/kota-bulan yang dinyatakan per 10 unit SPPG. Selain itu, juga melihat korelasi nilai tukar rupiah terhadap bahan pangan.

2.2 Metodologi

2.2.1 Dinamika Harga Pangan Lokal dan SPPG

Metode utama adalah *OLS panel fixed effects*. Model ini dipilih karena mampu membandingkan perubahan harga dalam kabupaten/kota yang sama dari waktu ke waktu, sekaligus mengontrol perbedaan tetap antarwilayah, perbedaan waktu nasional, dan perbedaan level harga antar-komoditas. Spesifikasi utama dapat ditulis sebagai:

$$\ln(\text{Price}_{ict}) = \beta_1 \text{SPPG}_{it} + \beta_2 (\text{SPPG}_{it} \times \text{MBGFood}_c) + \mu_i + \tau_t + \lambda_c + \varepsilon_{ict} \quad (1)$$

dengan Price_{ict} sebagai harga komoditas c di kabupaten/kota i pada bulan t ; SPPG_{it} sebagai intensitas SPPG; μ_i adalah *fixed effects* kabupaten/kota; τ_t adalah *fixed effects* bulan; λ_c adalah *fixed effects* komoditas; dan ε_{ict} adalah komponen galat (*error term*). Intensitas SPPG bulanan dikonstruksi dari empat titik observasi, yaitu September 2025, Desember 2025, Maret 2026, dan April 2026, menggunakan metode *last observation carried forward* (LOCF).

2.2.2 Melemahnya Rupiah dan Harga Pangan

Ada beberapa model yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian kedua ini, Model A-E. Berdasarkan model dibawah ini, Price_{ict} sebagai harga komoditas c di kabu-

paten/kota j , ER_t^{avg} sebagai rata-rata nilai tukar pada waktu t . Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel *ImportSensitive_c* sebagai komoditas c yang merupakan komoditas impor, *Rural* untuk mengidentifikasi perbedaan antara yang terjadi di daerah pedesaan atau perkotaan. Model E, kami mencoba melakukan analisis tambahan untuk melihat *vulnerability* sebagai upaya salah satu uji sensitivitas dari penelitian yang kami lakukan, dengan menggunakan variabel kontrol.

Model A. Direct correlation without month FE

A1. Direct exchange rate correlation

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 ER_t^{avg} + \mu_j + \gamma_c + \varepsilon_{jct} \quad (2)$$

A2. Direct exchange rate and import-sensitive interaction

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 ER_t^{avg} + \beta_2 (ER_t^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c) + \mu_j + \gamma_c + \varepsilon_{jct} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \ln(\text{Price}_{jct}) = & \beta_1 (ER_{t-1} \times \text{ImportSensitive}_c \times \text{Rural}_j) \\ & + \beta_2 (ER_{t-1} \times \text{ImportSensitive}_c \times \text{Urban}_j) \\ & + \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct} \end{aligned} \quad (4)$$

Model B. Pass-through with month FE

B1. Current-month exchange rate pass-through

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 (ER_t^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c) + \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct} \quad (5)$$

B2. One-month lag exchange rate pass-through

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 (ER_{t-1}^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c) + \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct} \quad (6)$$

B3. Two-month lag exchange rate pass-through

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 (ER_{t-2}^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c) + \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct} \quad (7)$$

Model C. Alternative exchange rate measures

C1. Lagged end-month exchange rate

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 (ER_{t-1}^{end} \times \text{ImportSensitive}_c) + \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct} \quad (8)$$

C2. Exchange rate volatility

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 (VOL_t^{ER} \times \text{ImportSensitive}_c) + \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct}$$

C3. Lagged exchange rate volatility

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 (VOL_{t-1}^{ER} \times \text{ImportSensitive}_c) + \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct}$$

Model D. Urban-rural heterogeneity

D1. Pooled kota/desa interaction

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 (ER_{t-1}^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c) + \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct}, \quad \text{Urban}_j = 1$$

D2. Pedesaan/rural

$$\ln(\text{Price}_{jct}) = \beta_1 (ER_{t-1}^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c) + \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct}, \quad \text{Rural}_j = 1$$

D3. Perkotaan/urban

$$\begin{aligned}\ln(\text{Price}_{jct}) &= \beta_1 (ER_{t-1}^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c \times \text{Rural}_j) \\ &+ \beta_2 (ER_{t-1}^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c \times \text{Urban}_j) \\ &+ \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct}\end{aligned}$$

Model E. Vulnerability

$$\begin{aligned}\ln(\text{Price}_{jct}) &= \beta_1 (ER_{t-1}^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c) \\ &+ \beta_2 (ER_{t-1}^{avg} \times \text{ImportSensitive}_c \times \text{Vulnerability}_j) \\ &+ \mu_j + \gamma_c + \lambda_t + \varepsilon_{jct}\end{aligned}$$

Variabel *vulnerability* dapat dijabarkan sebagai:

$$\begin{aligned}Vulnerability_j \in \{ &Poverty_{j,2024}, FoodInsecurity_{j,2024}, \\ &\ln(GRDP_{j,2025}), Poverty_{j,2025}, \\ &PovertyAvg_j, FoodInsecurity_{j,2025} \}\end{aligned}$$

3 Hasil dan Diskusi

3.1 Dinamika Harga Pangan Lokal dan SPPG

Figure 1 menunjukkan bahwa harga komoditas yang banyak digunakan dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis) mengalami fluktuasi yang lebih besar dibandingkan komoditas non-MBG³, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Temuan ini menunjukkan bahwa komoditas yang menjadi input utama MBG memiliki volatilitas harga yang lebih tinggi dibandingkan komoditas lainnya, sehingga lebih rentan terhadap perubahan kondisi pasar, pasokan, maupun distribusi.

Tabel 1 dalam model dasar (Model 1) menunjukkan bahwa penambahan 10 SPPG di kabupaten/kota berkorelasi dengan kenaikan harga bahan pangan sekitar 0,08% ($\beta = 0,0008; p < 0,01$). Korelasi tersebut juga bersifat positif dan signifikan ketika dikaitkan dengan skala program yang masif dan tersebar secara nasional. Menariknya, kenaikan harga terkonsentrasi pada kelompok komoditas yang menjadi input utama program MBG

³komoditas yang tidak banyak oleh SPPG, meski masih digunakan sesekali atau dalam periode tertentu

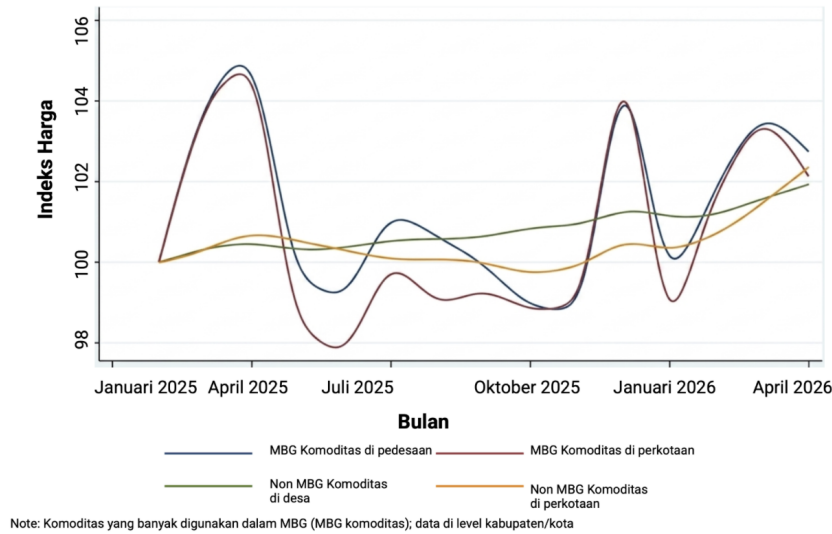


Figure 1: Indeks Harga Pangan Lokal yang Banyak dipakai SPPG, kota dan desa

Sumber: Badan Pangan dan Bank Indonesia (2025-2026), diolah peneliti.

seperti beras, telur, daging ayam, ikan, minyak goreng, gula, bawang, dan cabai (lihat kolom 1-8, Tabel 1).

Interaksi antara jumlah SPPG dan komoditas terkait MBG bernilai positif dan signifikan ($\beta = 0,0012 - 0,0013; p < 0,05$). Korelasi positif dan signifikan ini konsisten dengan berbagai model analisis yang digunakan dalam studi ini (lihat Kolom 1-8, Tabel 1). Dengan kata lain, daerah yang memiliki lebih banyak SPPG cenderung mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi pada bahan pangan yang umum digunakan dalam program MBG. Sehingga, setiap tambahan 10 unit SPPG berkorelasi dengan harga komoditas tersebut sekitar 0,12-0,13% lebih tinggi dibandingkan komoditas pangan lainnya⁴. Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa korelasi penambahan jumlah SPPG terhadap kenaikan harga pangan tidak terjadi secara langsung melainkan bertahap. Artinya, peningkatan harga pangan saat ini kemungkinan dipengaruhi oleh penambahan jumlah SPPG sebelumnya. Oleh karena itu, estimasi perlu mempertimbangkan adanya jeda waktu atau lag antara penambahan SPPG dan perubahan harga pangan.

Table 1: Hubungan Ekspansi SPPG dan Harga Pangan

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Basic FE	SPPG×MBG	SPPG×Import	Full Int.	Lag SPPG	Growth	Beneficiaries	Fund
SPPG per 10 unit	0.0008*** (0.0002)	-0.0001 (0.0004)	0.0008*** (0.0002)	-0.0003 (0.0004)		0.0009 (0.0075)		
MBG Commodity		1.1675*** (0.0073)		0.3050*** (0.0050)	1.1792*** (0.0074)	1.1792*** (0.0518)	1.1675*** (0.0073)	1.1675*** (0.0073)
MBG Commodity × SPPG		0.0012** (0.0005)		0.0013** (0.0005)		0.0189*** (0.0067)		
Observations	128,693	128,693	128,693	128,693	118,572	118,572	128,693	128,693
R^2	0.937	0.937	0.937	0.937	0.941	0.044	0.937	0.937
Adjusted R^2	0.937	0.937	0.937	0.937	0.941	0.040	0.937	0.937

Catatan: Standard error ditampilkan dalam tanda kurung. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$. Seluruh model mengontrol fixed effects kabupaten/kota, bulan, dan komoditas kecuali dinyatakan berbeda.

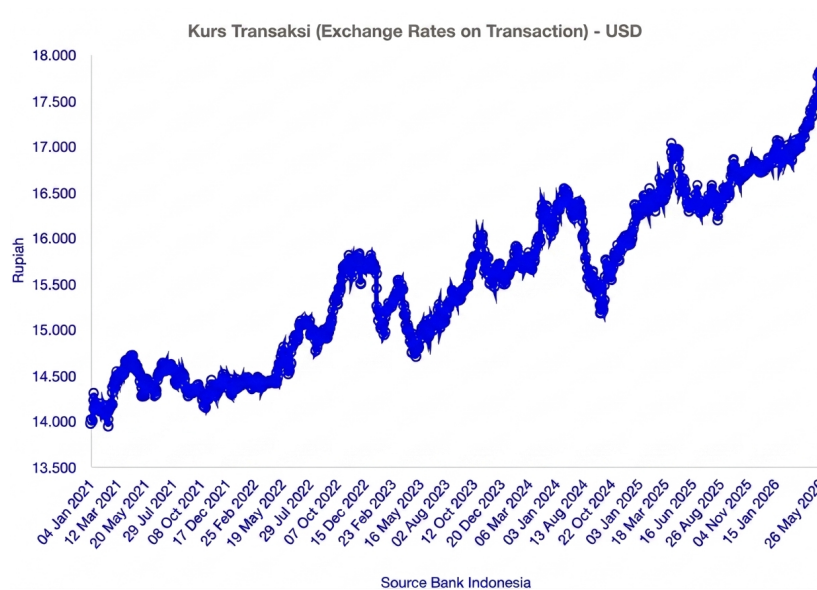


Figure 2: Nilai tukar rupiah terhadap AS Dollar

Sumber: Bank Indonesia (2026).

3.2 Melemahnya Rupiah dan Harga Pangan

Dolar AS merupakan mata uang dominan dalam perdagangan internasional, termasuk perdagangan komoditas pangan⁵. Konsekuensinya, pergerakan nilai dolar AS menjadi faktor penting dalam kajian volatilitas harga pangan karena dapat mempengaruhi harga komoditas di pasar global maupun domestik⁶. Dalam konteks studi ini, ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya pembelian barang impor meningkat sehingga dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. *Figure 3* menunjukkan bahwa kondisi global dan gejolak ekonomi di Indonesia turut menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Banyak narasi yang beredar seolah-olah pelemahan rupiah tidak berkorelasi dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan dianggap menguntungkan Indonesia. Anggapan itu cenderung menyesatkan. *Figure 3* menunjukkan bahwa beberapa komoditas pangan yang memiliki keterkaitan dengan impor cenderung bergerak searah dengan pelemahan nilai tukar rupiah, meskipun fluktuasi harga pangan berbeda antar-komoditas.

Pelemahan mata uang terhadap AS Dollar membuat barang impor dan input produksi

⁴Terdapat beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi harga pangan selama periode penelitian, termasuk kondisi makroekonomi dan pergerakan nilai tukar, temuan ini ditafsirkan sebagai hubungan korelasional yang konsisten dengan adanya tekanan permintaan lokal pada komoditas terkait MBG.

⁵Kirikkaleli, D., and I. Darbaz. 2022. "New Insights into an Old Issue: Modelling the US Food Prices." *Letters in Spatial and Resource Sciences* 15(3): 675–689. <https://doi.org/10.1007/s12076-022-00319-3>.

⁶ibid.

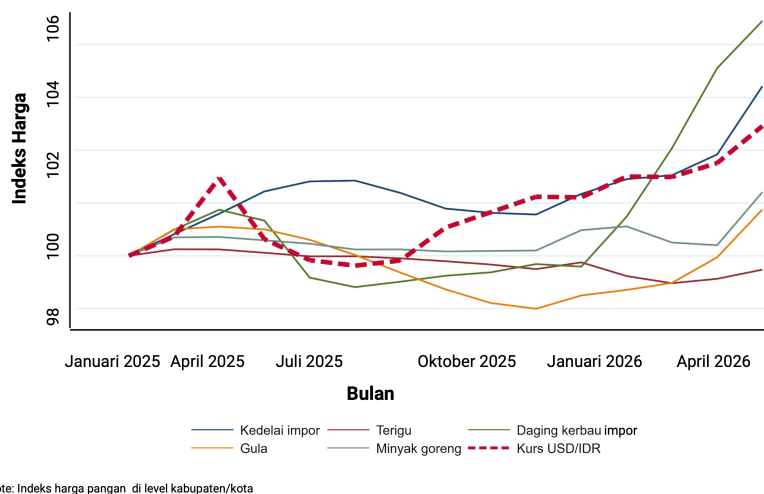


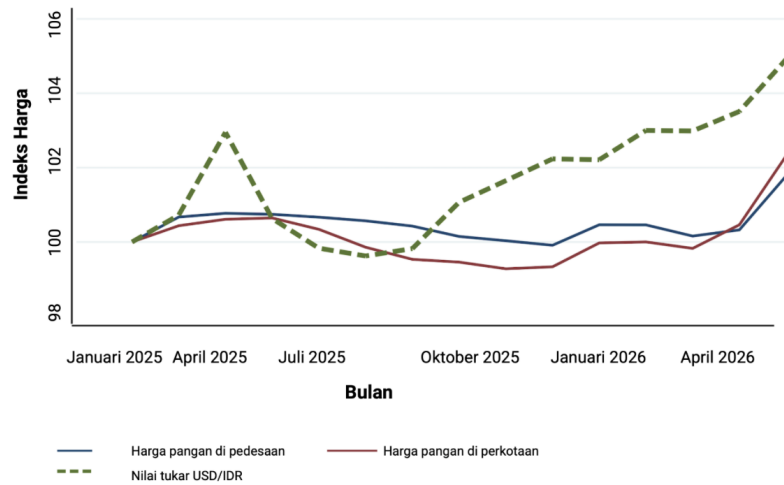
Figure 3: Tren Kurs AS Dollar/IDR dan Harga Bahan Pangan Impor

Sumber: Badan Pangan dan Bank Indonesia (2025-2026), diolah peneliti.

menjadi lebih mahal, sehingga harga barang yang dibayar konsumen ikut naik ⁷. Setelah sempat mengalami fluktuasi pada pertengahan 2025, kurs AS Dollar/IDR menunjukkan tren meningkat sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026. Pada periode yang sama, harga beberapa komoditas impor seperti kedelai impor dan terutama daging kerbau impor juga mengalami kenaikan yang cukup tajam. Harga kedelai, misalnya, naik seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal ini menjadi penting karena kedelai banyak digunakan untuk membuat tempe, susu kedelai dan makanan lokal lain yang banyak dikonsumsi masyarakat. Pola ini mengindikasikan adanya kemungkinan transmisi pelemahan nilai tukar ke harga pangan, khususnya pada komoditas yang bergantung pada pasar internasional. Pelemahan nilai tukar rupiah berimbas pada melonjaknya biaya impor bahan baku maupun produk jadi pada kelompok komoditas tersebut, sehingga berpotensi menekan harga pangan dan menambah beban biaya hidup rumah tangga.

Figure 4 menunjukkan bahwa harga bahan pangan di pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan searah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar AS secara langsung, harga pangan di pedesaan tetap bergerak mengikuti dinamika ekonomi yang terjadi secara nasional, khususnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap

⁷Colicev, A., Hoste, J., Konings, J. (2024). THE IMPACT OF A LARGE DEPRECIATION ON THE COST OF LIVING OF RICH AND POOR CONSUMERS. *International Economic Review*. <https://doi.org/10.1111/iere.12720>.



Note: Indeks harga pangan di level kabupaten/kota

Figure 4: Tren Kurs AS Dollar/IDR dan Harga Bahan Pangan di Pedesaan dan Perkotaan
Sumber: Badan Pangan dan Bank Indonesia (2025-2026), diolah peneliti.

dolar AS

Tabel 2 menunjukkan bahwa hubungan antara nilai tukar dan harga pangan memang terlihat pada tingkat agregat. Namun setelah berbagai shock bulanan nasional dikendalikan, bukti transmisi langsung nilai tukar menjadi jauh lebih lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat pedesaan tidak hanya dipengaruhi oleh stabilitas kurs, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan, distribusi, stok, dan inflasi domestik. Dengan demikian, kenaikan harga yang dirasakan masyarakat desa terjadi secara tidak langsung melalui kenaikan biaya produksi dan rantai pasok (imported inflation). Hasil analisis diatas harus direspon lebih lanjut oleh pemerintah, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor, karena secara tidak langsung harga pangan sehari-hari akan bisa mengalami kenaikan harga karena nilai rupiah melemah terutama untuk komoditas yang bergantung pada impor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti sereal (beras dan gandum), gula, minyak goreng, produk susu, daging, ikan, sayuran, buah-buahan, garam, pupuk, produk farmasi, sabun dan deterjen, serta berbagai produk berbahan plastik, kertas, tekstil, dan alas kaki⁸. Sehingga perlu dilakukan peneliti lanjutan terkait lag waktu⁹ yang diperlukan hingga pelemahan rupiah benar-benar mempengaruhi harga pangan lokal.

⁸Kementerian Perdagangan (2026)

⁹Lag waktu adalah selang waktu antara suatu peristiwa/variabel (dalam penelitian ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap AS Dollar) penyebab dengan munculnya dampak atau responsnya.

Table 2: Hubungan Nilai Tukar Rupiah dan Harga Pangan

Model	Koefisien	Interpretasi	Beta	SE	p-value
A1 Direct ER	ER_t^{avg}	Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.	0.0045***	0.0004	< 0.001
A2 Direct ER + Import	ER_t^{avg}	Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.	0.0061***	0.0005	< 0.001
A2 Direct ER + Import	ER_t	Pengaruh nilai tukar pada komoditas yang sensitif terhadap impor.	-	0.0005	< 0.001
B Lag Pass-Through	$ImportSensitivity_c$	\times Pengaruh nilai tukar bulan sebelumnya pada komoditas sensitif impor.	0.0054***		
B Lag Pass-Through	$L1 ER$	\times Pengaruh nilai tukar bulan sebelumnya pada komoditas sensitif impor.	-0.0011	0.0036	0.769
B Lag Pass-Through	$ImportSensitivity_c$	\times Pengaruh nilai tukar akhir bulan sebelumnya pada komoditas sensitif impor.	-0.0014	0.0032	0.676
C Alternative ER	$L1 EndMonthER$	\times Pengaruh ketidastabilan nilai tukar pada komoditas sensitif impor.	0.0001	0.0001	0.357
C Volatility	$ImportSensitivity_c$	\times Pengaruh ketidastabilan nilai tukar bulan sebelumnya pada komoditas sensitif impor.	0.0003*	0.0001	0.072
C Lag Volatility	$L1 Volatility$	\times Pengaruh nilai tukar bulan sebelumnya terhadap harga komoditas sensitif impor di wilayah pedesaan.	-0.0004	0.0035	0.909
D Urban-Rural	$ImportSensitivity_c$	\times Pengaruh nilai tukar bulan sebelumnya terhadap harga komoditas sensitif impor di wilayah perkotaan.	-0.0036	0.0043	0.414
D Urban-Rural	$L1 ER$	\times Pengaruh nilai tukar pada komoditas sensitif impor di daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi.	-0.0006	0.0012	0.624
D Urban-Rural	$ImportSensitivity_c$	\times Pengaruh nilai tukar pada komoditas sensitif impor di daerah dengan tingkat kerawanan pangan lebih tinggi.	-0.0016	0.0012	0.200
D Urban-Rural	$Poverty_{2025}$				
D Urban-Rural	$L1 ER$				
D Urban-Rural	$ImportSensitivity_c$				
D Urban-Rural	$FoodInsecurity_{2025}$				

Catatan: Standard error ditampilkan dalam tanda kurung. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$. Seluruh model mengontrol fixed effects wilayah dan komoditas. Model B-E juga mengontrol fixed effects bulan.

3.3 *Robustness Check*

Penelitian ini memiliki beberapa limitasi¹⁰, namun peneliti berupaya menjaga ketelitian analisis melalui serangkaian spesifikasi dan uji ketahanan (*robustness checks*). Selain model dasar dengan district, bulan, dan komoditas *fixed effects*, penelitian ini menguji heterogenitas berdasarkan komoditas yang terkait dengan MBG ($SPPG \times MBG$ komoditas) dan komoditas sensitif impor ($SPPG \times import-sensitive$ komoditas), menggunakan spesifikasi lag untuk mengakomodasi kemungkinan jeda penyesuaian harga, serta menggunakan ukuran alternatif intensitas program berupa estimasi jumlah penerima manfaat dan estimasi dana program. Hasil yang diperoleh menunjukkan pola yang relatif konsisten di berbagai spesifikasi tersebut. Penelitian ini juga mengestimasi model dengan memasukkan berbagai karakteristik sosial ekonomi daerah sebagai variabel kontrol, meskipun data tersebut hanya tersedia pada beberapa titik waktu.

Variabel yang digunakan mencakup prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, jumlah penduduk miskin, indeks keparahan kemiskinan (P2), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, indeks harga konsumen, serta rata-rata konsumsi kelompok daging, ikan, dan telur-susu pada tingkat kabupaten/kota. Secara umum, arah dan signifikansi hasil utama tetap konsisten setelah berbagai kontrol tersebut diperhitungkan, sehingga meningkatkan keyakinan bahwa temuan yang diperoleh tidak semata-mata didorong oleh perbedaan karakteristik sosial ekonomi antarwilayah.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, peneliti memastikan penggunaan beberapa model untuk memastikan hasilnya robust. Sehingga analisis pada bagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak bergantung pada satu spesifikasi model atau satu definisi variabel tertentu. Analisis dimulai dengan model korelasi sederhana tanpa *month fixed effects* untuk menangkap hubungan agregat antara nilai tukar dan harga pangan, kemudian dilanjutkan dengan *model pass-through* yang memasukkan *district fixed effects*, *commodity fixed effects*, dan *month fixed effects* guna mengisolasi

¹⁰Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hasil yang diperoleh bersifat asosiasional dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan kausal. Kedua, lokasi dan intensitas SPPG tidak ditentukan secara acak. Serta, data SPPG hanya tersedia pada empat titik waktu sehingga nilai bulanan lainnya dikonstruksi menggunakan pendekatan *Last Observation Carried Forward (LOCF)*. Ketiga, ukuran penerima manfaat dan dana program merupakan proksi berbasis asumsi, bukan data realisasi aktual karena keterbatasan ketersediaan data. Keempat, analisis belum secara eksplisit mengendalikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi harga pangan, seperti musim panen, cuaca, stok pangan, biaya logistik, serta periode Ramadan dan Idulfitri. Oleh karena itu, temuan penelitian perlu ditafsirkan secara hati-hati sebagai bukti awal mengenai keterkaitan antara ekspansi SPPG dan dinamika harga pangan lokal.

pengaruh perubahan nilai tukar terhadap komoditas sensitif impor. *Robustness check* juga diuji melalui beberapa variasi spesifikasi, termasuk penggunaan kurs rata-rata bulanan, kurs akhir bulan, volatilitas kurs, serta lag satu dan dua bulan untuk menangkap kemungkinan keterlambatan transmisi harga. Penelitian lanjutan juga akan dilakukan di studi terpisah untuk melihat lag waktu yang dibutuhkan dari pelemahan rupiah terhadap harga pangan lokal. Penelitian ini menjadi temuan awal yang patut diberi atensi, sehingga tidak serta merta diabaikan oleh pemangku kebijakan.

3.4 Rekomendasi Kebijakan

Kenaikan harga pangan strategis, khususnya yang menjadi input utama program MBG, memiliki implikasi yang sangat serius pada keluarga menengah bawah. Kelompok miskin mengalokasikan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk pangan dibandingkan kelompok atas. Dampaknya, setiap kenaikan harga pangan yang mungkin hanya sekitar Rp 1,000-5,000 sangat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat rentan. Tidak hanya itu, terdapat risiko *crowding out* dalam pasar pangan lokal dimana pemasok cenderung lebih memilih kontrak besar dengan harga yang lebih tinggi dari pemerintah dibandingkan menjualnya ke pasar tradisional atau pedagang kecil. Kondisi ini justru bisa memperlemah pelaku ekonomi lokal berskala kecil.

Oleh karena itu, pemerintah bisa melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah bisa melakukan moratorium dan perombakan total program MBG menjadi targeted ke daerah 3T dan masyarakat tidak mampu. Pada saat yang sama, pemerintah bisa memperkuat sistem pemantauan harga komoditas utama MBG di tingkat daerah. Komoditas yang banyak digunakan dalam MBG seperti telur, ayam, beras, minyak goreng, kedelai, dan bahan pangan lainnya perlu dipantau secara berkala untuk mendeteksi potensi tekanan harga sejak dini, terutama di wilayah dengan ekspansi SPPG yang cepat.

Kedua, *redesign* program MBG perlu difokuskan pada desentralisasi pelaksanaan program. Program MBG harus melibatkan komunitas lokal, sekolah, petani, peternak, pedagang lokal dan BUMDES. Pemerintah harus menghentikan ekspansi dapur-dapur berskala besar yang dikerjakan oleh pemain-pemain besar dengan skema pengadaan yang cenderung monopolistik dan mementingkan pemain ekonomi berskala besar. Pendekatan yang lebih desentralistik bisa mengurangi risiko ketergantungan pada pasokan dari luar daerah atau bahan baku impor. Adanya diversifikasi menu dan sumber bahan baku dalam komposisi menu MBG juga dapat membantu mengurangi tekanan permintaan

pada komoditas tertentu ketika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga. Ketiga, pemerintah harus melakukan sinkronisasi perencanaan MBG dengan data produksi dan musim panen, bukan dengan memperbanyak pembelian produk impor dan dari korporasi besar. Langkah ini penting untuk memperkuat pangan lokal dan kesejahteraan petani dan peternak dalam negeri.

Terakhir, pelemahan rupiah tidak seharusnya dianggap sebagai isu tidak penting atau tidak berdampak pada masyarakat. Pemerintah perlu mengurangi komunikasi publik yang berpotensi menyesatkan (misleading) terkait dampak pelemahan rupiah pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

3.5 Kesimpulan

Pemerintah perlu menempatkan persoalan MBG secara holistik termasuk dampak ke tekanan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti ayam, telur. Studi CELIOS menunjukkan bahwa harga pangan ikut naik sejalan dengan penambahan jumlah SPPG. Jumlah target porsi MBG per SPPG, pembelian bahan makanan di tingkat distributor utama menimbulkan distorsi pada harga pangan di ritel.

Sementara itu, pola komunikasi Presiden dalam menyederhanakan persoalan nilai tukar Rupiah dinilai kurang tepat. Efek pelemahan kurs rupiah berisiko terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di pedesaan. Tanpa adanya upaya mitigasi yang lebih proporsional, tekanan pelemahan rupiah akan diteruskan ke *imported inflation*, yang akan ditanggung pedagang hingga konsumen di pedesaan.
